

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Indonesia: Tantangan, Strategi, Dan Kolaborasi Berkelanjutan

Andi Aswad Jahudin¹, Masduki Ahmad², Kamaludin³

¹Universitas Negeri Jakarta

²Universitas Negeri Jakarta

³Universitas Negeri Jakarta

E-mail: andiaswadjahudin@gmail.com¹, Masduki@unj.ac.id², kamaludin@unj.ac.id³

Article History:

Received: 19 Desember 2024

Revised: 04 Januari 2025

Accepted: 06 Januari 2025

Kata Kunci: Mutu

Pendidikan, Kebijakan
Pemerintah, Strategi,
Kolaborasi Berkelanjutan

Abstrak: Mutu pendidikan merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan kompetitif. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis, seperti reformasi kurikulum, pelatihan guru, pemerataan akses pendidikan, dan digitalisasi pembelajaran. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan besar, termasuk disparitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan menyoroti tantangan utama, strategi penyelesaian, serta pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta. Studi ini menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan memerlukan sinergi multisektoral yang holistik, penggunaan teknologi yang merata, dan pemanfaatan kebijakan berbasis bukti untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global.

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan merupakan indikator penting dalam menentukan perkembangan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing. SDM yang unggul menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan ekonomi, teknologi, dan sosial suatu bangsa di era globalisasi. Menurut Hanushek dan Woessmann (2020), investasi pada pendidikan berkualitas akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas ekonomi dan daya saing global suatu negara. Negara-negara maju seperti Finlandia dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan merupakan kunci utama dalam mencetak SDM unggul dan kompetitif.

Di Indonesia, pemerintah menyadari pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan, di antaranya reformasi kurikulum,

peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerataan akses pendidikan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Reformasi Kurikulum Merdeka, program pelatihan guru, dan digitalisasi pendidikan merupakan langkah konkret yang telah dijalankan. Kebijakan ini sejalan dengan penelitian OECD (2021) yang menekankan pentingnya kurikulum fleksibel dan integrasi teknologi sebagai solusi efektif dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21.

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah digulirkan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Disparitas pendidikan antarwilayah, baik dalam aspek akses maupun kualitas, masih menjadi salah satu permasalahan mendasar. Menurut penelitian UNESCO (2022), daerah-daerah terpencil seringkali tertinggal dalam hal infrastruktur pendidikan, distribusi tenaga pendidik berkualitas, dan akses terhadap teknologi informasi. Kondisi ini semakin memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang pada akhirnya memengaruhi pemerataan kesempatan belajar yang berkualitas.

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan, sarana prasarana, maupun tenaga pendidik, turut menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan. Anggaran pendidikan, meskipun telah mencapai 20% dari APBN, seringkali belum optimal dalam penggunaannya, terutama untuk daerah yang membutuhkan perhatian lebih (World Bank, 2021). Hal ini diperparah dengan minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyaluran sumber daya pendidikan, sehingga banyak program yang kurang tepat sasaran dan tidak berkelanjutan.

Di sisi lain, rendahnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta membuat upaya peningkatan mutu pendidikan berjalan kurang efektif. Bryson et al. (2015) menyatakan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan memiliki peran krusial dalam menciptakan sinergi untuk mengatasi tantangan kompleks dalam sistem pendidikan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak, strategi peningkatan mutu pendidikan dapat lebih terarah dan berdampak signifikan.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah menjadi krusial. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan memberikan hasil yang diharapkan. Evaluasi yang komprehensif dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan mutu pendidikan serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Hanushek dan Woessmann (2020) menekankan bahwa pengukuran efektivitas kebijakan pendidikan harus berfokus pada hasil belajar siswa dan perbaikan sistem pengajaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, strategi yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut, serta peran kolaborasi berkelanjutan antara pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.

LANDASAN TEORI

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (2017) adalah "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Kebijakan publik dalam pendidikan mencakup seluruh proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, serta relevansi pendidikan. Howlett, Ramesh, dan Perl (2020) menambahkan

bahwa kebijakan publik yang efektif harus berfokus pada analisis berbasis bukti (evidence-based policy), keterlibatan pemangku kepentingan, dan fleksibilitas kebijakan dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi. Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik berperan sebagai fondasi untuk mencapai keadilan sosial melalui distribusi sumber daya, pengembangan kurikulum yang relevan, serta perbaikan sistem pendidikan secara berkelanjutan.

2. Teori Manajemen Pendidikan

Menurut Yukl (2013), manajemen pendidikan yang efektif memerlukan kepemimpinan yang visioner, perencanaan strategis, serta pengelolaan sumber daya manusia dan material yang optimal. Kepala sekolah sebagai pemimpin manajerial memainkan peran kunci dalam memastikan efektivitas organisasi sekolah melalui peningkatan kinerja guru, pengembangan kurikulum, dan pembinaan budaya sekolah yang positif. Bush dan Glover (2014) menegaskan bahwa manajemen pendidikan harus menggabungkan pendekatan instruksional, transformasional, dan distribusional guna mendorong pencapaian tujuan pendidikan. Selain itu, Fullan (2020) menekankan bahwa inovasi kepemimpinan diperlukan untuk menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21, seperti digitalisasi, tuntutan globalisasi, dan keberlanjutan.

3. Teori Kolaborasi dan Stakeholder

Kolaborasi antarpemangku kepentingan merupakan kunci dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Menurut Bryson, Crosby, dan Stone (2015), kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan—seperti pemerintah, sekolah, keluarga, komunitas, dan sektor swasta—dapat menciptakan sinergi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan mencapai hasil yang optimal. Kolaborasi dalam pendidikan membutuhkan komunikasi yang efektif, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Epstein (2011) memperkenalkan model kolaborasi "Six Types of Involvement" yang mencakup parenting, komunikasi, volunteering, pembelajaran di rumah, pengambilan keputusan, dan kolaborasi dengan komunitas. Selain itu, Wenger, McDermott, dan Snyder (2002) menekankan pentingnya pembentukan communities of practice untuk mendorong berbagi pengetahuan, pengalaman, dan solusi inovatif dalam pengelolaan pendidikan.

4. Penelitian Terkini

Penelitian oleh Hanushek dan Woessmann (2020) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas guru melalui program pengembangan profesional dan kurikulum berbasis kompetensi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Guru yang memiliki keterampilan pedagogis dan subject-matter expertise yang kuat lebih efektif dalam membangun lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kognitif siswa. Selain itu, studi oleh OECD (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, seperti pembelajaran berbasis digital dan platform daring, mampu memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas serta meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran. Namun, Selwyn (2016) menekankan bahwa implementasi teknologi harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kompetensi digital pendidik, serta akses yang merata bagi seluruh siswa agar tidak memperburuk kesenjangan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber sekunder, seperti jurnal akademik, laporan organisasi internasional (OECD, UNESCO), kebijakan pemerintah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas kebijakan pendidikan di Indonesia, tantangan dalam implementasinya, serta strategi dan kolaborasi yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang memfokuskan pada identifikasi, pengorganisasian, dan interpretasi pola-pola tematik dalam data terkait kebijakan pendidikan, disparitas, digitalisasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

1.1 Disparitas Akses Pendidikan

Disparitas akses pendidikan masih menjadi masalah mendalam yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. World Bank (2021) menyatakan bahwa ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan sebagian besar disebabkan oleh faktor geografis, ekonomi, dan kebijakan yang tidak inklusif. Anak-anak di daerah pedesaan sering kali terhambat oleh jarak yang jauh dari sekolah yang memadai, kekurangan fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan ruang belajar yang memadai, serta terbatasnya jumlah guru berkualitas yang siap untuk mengajar di daerah tersebut. Hal ini memperburuk kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di daerah perkotaan dan pedesaan. UNESCO (2020) juga melaporkan bahwa disparitas ini turut dipengaruhi oleh ketidakmerataan pendistribusian anggaran pendidikan, yang sering kali lebih difokuskan pada daerah urban yang lebih berkembang, sementara daerah pedesaan atau terpencil mendapat anggaran yang lebih rendah.

Penelitian oleh Kurniawati et al. (2022) menunjukkan bahwa salah satu faktor terbesar yang memengaruhi kesenjangan pendidikan di daerah terpencil adalah keterbatasan infrastruktur transportasi. Jarak yang jauh antara rumah siswa dan sekolah menyebabkan anak-anak di daerah pedesaan harus menempuh perjalanan panjang, sering kali dengan kondisi jalan yang tidak baik dan sarana transportasi yang terbatas. Gertler et al. (2018) menambahkan bahwa keterbatasan transportasi dan infrastruktur fisik yang buruk dapat menghalangi akses anak-anak untuk bersekolah secara teratur, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pembelajaran yang mereka terima. Hal ini memperburuk siklus kemiskinan, karena pendidikan yang kurang memadai akan membatasi kesempatan anak-anak untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik di masa depan.

Untuk mengatasi disparitas ini, strategi seperti pembangunan sekolah di daerah terpencil dan program afirmasi pendidikan sangat penting. OECD (2021) menekankan pentingnya kebijakan afirmasi yang memberi kesempatan lebih bagi anak-anak di daerah miskin dan terpencil untuk mengakses pendidikan berkualitas, termasuk memberikan insentif kepada guru untuk mengajar di daerah terpencil, serta pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih merata. Di Indonesia, kebijakan pemerintah seperti Program Indonesia Pintar dan Sekolah Penggerak diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ini dengan menyediakan dukungan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di daerah yang kurang terlayani. Menurut Hanushek dan Woessmann (2020), program afirmasi

pendidikan dapat menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi anak-anak di daerah yang kurang berkembang untuk mengakses pendidikan berkualitas, yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka di masa depan.

1.2 Kualitas Tenaga Pendidik

Kualitas tenaga pendidik merupakan salah satu faktor penentu utama dalam keberhasilan sistem pendidikan. Hanushek dan Rivkin (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas pengajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, bahkan lebih besar dari faktor lain seperti anggaran pendidikan atau ukuran kelas. Kualitas guru berhubungan langsung dengan efektivitas pengajaran dan peningkatan pencapaian akademik siswa. Namun, tantangan besar muncul ketika kualitas pengajaran di daerah terpencil sering kali terhambat oleh kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya motivasi dan kompensasi bagi guru yang bekerja di daerah tersebut. Hammond et al. (2017) menambahkan bahwa guru yang terlatih dengan baik memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Salah satu kendala utama dalam meningkatkan kualitas guru adalah rendahnya kompetensi pedagogis dan profesional, terutama di daerah terpencil. OECD (2021) dalam laporannya menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru, yang tidak hanya mencakup peningkatan kemampuan mengajar, tetapi juga keterampilan untuk mengelola kelas dengan efektif, serta memahami dan mengimplementasikan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan siswa. Pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memperbarui pengetahuan guru tentang teknik mengajar yang lebih inovatif, serta mengembangkan keterampilan mereka dalam menghadapi tantangan pengajaran yang semakin kompleks di era globalisasi dan teknologi. Ingersoll (2018) juga menggarisbawahi bahwa guru yang terus-menerus mengikuti pelatihan akan lebih siap dalam mengatasi perbedaan individu siswa dan lebih mampu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Di Indonesia, laporan dari Puslitjakdikbud (2020) menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum menguasai teknologi pembelajaran digital, padahal kompetensi ini sangat penting di era pendidikan abad ke-21, terutama dengan semakin berkembangnya pembelajaran berbasis teknologi. Kirkwood dan Price (2014) menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memperluas sumber daya pendidikan, dan memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di daerah terpencil antara lain adalah program sertifikasi guru yang lebih terstruktur, pelatihan berbasis teknologi, serta pemberian insentif khusus bagi guru yang mengajar di daerah terpencil. Sykes et al. (2017) juga mengemukakan bahwa memberikan insentif yang tepat dapat memotivasi guru untuk bekerja lebih baik dan bertahan lebih lama di daerah yang kekurangan tenaga pendidik berkualitas, sehingga membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

1.3 Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan adalah masalah yang signifikan dalam

sistem pendidikan di banyak negara, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan kurang berkembang. UNESCO (2020) menyatakan bahwa infrastruktur pendidikan yang baik memainkan peran penting dalam meningkatkan kenyamanan belajar bagi siswa dan efektivitas pengajaran oleh guru. Infrastruktur yang memadai, seperti gedung sekolah yang aman dan nyaman, fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet yang stabil, memungkinkan siswa untuk belajar dengan lebih baik dan guru untuk mengajar dengan lebih efektif. Sebaliknya, kondisi fisik sekolah yang buruk dan kekurangan fasilitas pendidikan dapat menghambat proses pembelajaran, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk perkembangan akademik siswa. Vaughan et al. (2018) menambahkan bahwa kondisi fisik sekolah berhubungan langsung dengan tingkat kehadiran siswa dan hasil belajar mereka, dengan sekolah yang baik dan fasilitas lengkap meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa untuk belajar.

Di daerah pedesaan dan terpencil, masalah ini menjadi lebih parah karena keterbatasan sumber daya dan alokasi anggaran yang sering kali tidak mencukupi. Hidayat dan Supriyadi (2021) dalam penelitian mereka menemukan bahwa daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap sumber daya mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Kekurangan fasilitas seperti ruang kelas yang memadai, laboratorium, dan akses internet yang cepat menghalangi siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Selain itu, pendanaan yang terbatas juga menghambat kemampuan sekolah untuk memelihara dan memperbaiki fasilitas yang ada. Sebagai contoh, banyak sekolah di daerah terpencil yang masih menggunakan bangunan sekolah yang rusak dan tidak memiliki fasilitas dasar untuk mendukung pembelajaran yang efektif.

Studi lebih lanjut oleh Zhou dan Lee (2021) menekankan bahwa kurangnya investasi dalam sarana dan prasarana pendidikan berkontribusi pada kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam banyak kasus, sekolah di perkotaan sering kali mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk renovasi dan pengadaan fasilitas dibandingkan dengan sekolah di daerah pedesaan. Hal ini memperburuk ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di kedua wilayah tersebut. Di sisi lain, di banyak daerah terpencil, fasilitas sekolah yang ada tidak hanya minim tetapi juga tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan siswa yang semakin berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Hidayat dan Supriyadi (2021) menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah pusat dapat menyediakan dana untuk pembangunan sekolah baru dan renovasi sekolah yang sudah ada, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan fasilitas tersebut tepat sasaran dan dikelola dengan baik. Sektor swasta juga dapat berperan melalui program corporate social responsibility (CSR), yang dapat mencakup donasi peralatan pendidikan, bantuan renovasi gedung, atau pembangunan fasilitas teknologi untuk mendukung pendidikan digital di daerah yang kurang berkembang.

Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan sarana dan prasarana pendidikan dapat merata di seluruh wilayah, sehingga kualitas pendidikan juga dapat ditingkatkan. Selain itu, OECD (2021) menyarankan pentingnya penggunaan teknologi untuk

memperluas akses pendidikan di daerah-daerah yang kurang berkembang. Platform pendidikan digital dan pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan fasilitas fisik dan memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari lokasi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

1.4 Tantangan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan menjadi tantangan yang semakin besar, terutama di daerah terpencil yang masih memiliki infrastruktur digital yang sangat terbatas. Selwyn (2016) menyoroti bahwa kesenjangan akses teknologi menjadi salah satu hambatan utama dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis digital, yang semakin dibutuhkan di era pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berbasis teknologi memungkinkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel, personalisasi, serta dapat menjangkau lebih banyak siswa. Namun, ketidakmerataan infrastruktur teknologi menyebabkan sebagian besar daerah, khususnya yang terletak di wilayah terpencil, tertinggal dalam mengakses sumber daya pendidikan digital yang semakin penting. Akibatnya, siswa di daerah-daerah ini berisiko kehilangan peluang yang setara untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang didorong oleh teknologi.

Selain masalah infrastruktur, tantangan lainnya adalah kurangnya kompetensi digital yang dimiliki oleh tenaga pendidik. Zhao et al. (2021) mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat literasi digital di kalangan guru menjadi kendala besar dalam penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru yang tidak terbiasa dengan teknologi pendidikan atau tidak memiliki keterampilan untuk menggunakan perangkat dan aplikasi pembelajaran digital akan kesulitan dalam mengoptimalkan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar. Dalam beberapa kasus, guru bahkan merasa terintimidasi oleh penggunaan teknologi baru, yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka dalam menyampaikan materi secara efektif dengan bantuan teknologi. Oleh karena itu, pelatihan literasi digital bagi guru sangat diperlukan untuk mempersiapkan mereka agar dapat menggunakan teknologi secara optimal.

Masalah lain yang memperburuk kesenjangan akses teknologi adalah keterbatasan akses internet yang stabil di daerah-daerah terpencil. OECD (2021) menyarankan bahwa pemerintah perlu menyediakan infrastruktur teknologi yang merata di seluruh wilayah, khususnya di daerah-daerah yang kurang berkembang. Akses internet yang cepat dan stabil adalah kebutuhan dasar untuk menjalankan berbagai platform pembelajaran online dan e-learning. Tanpa akses yang memadai, siswa di daerah tersebut tidak dapat memanfaatkan materi pembelajaran digital, yang menghambat proses pembelajaran mereka. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur teknologi yang merata, termasuk peningkatan jaringan internet di daerah pedesaan dan terpencil, harus menjadi prioritas utama untuk mendukung pendidikan berbasis teknologi.

Untuk mengatasi tantangan ini, OECD (2021) juga merekomendasikan kolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk memperluas akses internet dan menyediakan perangkat teknologi yang lebih terjangkau. Inisiatif kemitraan antara sektor publik dan swasta dapat membantu mempercepat penyediaan teknologi pendidikan yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan teknologi dapat berperan dalam menyediakan perangkat dengan harga terjangkau atau bahkan gratis untuk digunakan di sekolah-sekolah yang kekurangan sumber daya. Kolaborasi ini dapat memastikan bahwa teknologi pendidikan tidak hanya

tersedia untuk daerah perkotaan tetapi juga untuk wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, dan orang tua, mendapatkan pelatihan yang memadai agar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam mendukung proses pendidikan.

2. Strategi Pemerintah

2.1 Peningkatan Kompetensi Guru

Peningkatan kompetensi guru telah menjadi salah satu prioritas utama dalam strategi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. OECD (2021) menekankan bahwa program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan bagi guru sangat penting untuk memastikan pengajaran yang berkualitas. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan pedagogis, tetapi juga pada penguasaan teknologi dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kurikulum yang terus berubah. Kompetensi guru yang terus ditingkatkan akan berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa, yang merupakan indikator utama dalam evaluasi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi yang komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa guru memiliki keterampilan yang relevan dan up-to-date.

Di Indonesia, program seperti Guru Penggerak yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), menjadi salah satu inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas guru dalam mengembangkan kepemimpinan pedagogis. Program ini dirancang untuk melatih guru agar dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya mengajarkan materi pelajaran tetapi juga membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif. Hanushek dan Rivkin (2019) mengungkapkan bahwa guru yang terlatih dengan baik dapat membawa dampak signifikan terhadap hasil belajar siswa. Mereka menambahkan bahwa kualitas pengajaran yang tinggi bergantung pada kemampuan guru untuk merancang pembelajaran yang inovatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Pentingnya peningkatan kompetensi guru juga diimbangi dengan penekanan pada rekrutmen guru yang profesional. Hanushek dan Rivkin (2019) menyatakan bahwa pemilihan guru dengan kompetensi yang tinggi merupakan langkah pertama dalam memastikan kualitas pendidikan yang baik. Oleh karena itu, sistem rekrutmen guru harus selektif dan berbasis pada kompetensi yang terstandarisasi. Guru yang memiliki pengetahuan yang mendalam, keterampilan pedagogis yang mumpuni, dan kemampuan untuk mengajar di berbagai lingkungan, termasuk di daerah tertinggal, akan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang beragam. Di sisi lain, OECD (2021) juga menekankan pentingnya pendidikan guru yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang.

Selain itu, untuk memperkuat sistem pendidikan secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta sangat diperlukan. Pelatihan berkelanjutan bagi guru tidak hanya dapat dilakukan melalui program pemerintah, tetapi juga dengan bekerja sama dengan universitas dan organisasi pendidikan internasional untuk menawarkan kursus dan pelatihan berbasis kebutuhan pendidikan lokal dan global.

Melalui pendekatan ini, kompetensi guru dapat terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi, metode pengajaran, dan kebutuhan pasar kerja yang berubah. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem pelatihan yang berkelanjutan yang mendukung pengembangan profesional guru secara menyeluruh.

2.2 Reformasi Kurikulum

Reformasi kurikulum merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya penting dalam hal ini adalah penerapan Kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk membebaskan proses belajar-mengajar dari pendekatan konvensional yang lebih menekankan pada transfer pengetahuan semata. Kurikulum ini, seperti yang dijelaskan oleh Mendikbud Nadiem Makarim (2020), bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel, berfokus pada minat dan bakat siswa, serta mendorong pendekatan yang lebih kreatif dan kritis dalam mengatasi permasalahan. Dalam kurikulum ini, siswa diharapkan tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman, seperti kemampuan berpikir kritis dan kreatif.

Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi siswa untuk belajar secara lebih mandiri dan terarah sesuai dengan minat mereka, yang tentunya dapat memotivasi mereka untuk lebih aktif dalam belajar. Anggraini et al. (2022) menyatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi, seperti yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka, memfasilitasi pengembangan keterampilan abad ke-21 yang sangat dibutuhkan di dunia kerja masa depan. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas yang dapat meningkatkan daya saing siswa di tingkat global. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi ini juga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan yang pesat di dunia kerja.

Selain itu, Kurikulum Merdeka juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tuntutan globalisasi. Pembelajaran berbasis teknologi menjadi salah satu komponen penting dalam kurikulum ini, yang memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran secara lebih fleksibel dan interaktif. OECD (2020) menyatakan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan dapat mempercepat proses belajar dan memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan digital yang akan menjadi salah satu keunggulan di masa depan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kemajuan teknologi adalah suatu keharusan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global.

Reformasi kurikulum ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara berbagai daerah di Indonesia. Kurikulum Merdeka memberi kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan karakteristik siswa di masing-masing wilayah, yang tentu saja akan lebih relevan dan efektif. Hal ini sejalan dengan Howlett, Ramesh, dan Perl (2020), yang berpendapat bahwa kebijakan pendidikan yang berbasis pada konteks lokal dan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat daerah dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, kurikulum ini tidak hanya berfokus pada pengajaran di kelas, tetapi juga berupaya menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Meskipun Kurikulum Merdeka menawarkan berbagai kemudahan dan fleksibilitas, tantangan terbesar terletak pada implementasinya yang memerlukan dukungan penuh dari seluruh elemen pendidikan, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga masyarakat. Hanushek dan Rivkin (2019) mengingatkan bahwa meskipun kurikulum yang baik dapat menghasilkan dampak positif pada kualitas pendidikan, faktor utama keberhasilan terletak pada bagaimana kurikulum tersebut diterapkan oleh guru yang terlatih dengan baik dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap siswa memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas.

2.3 Pemerataan Infrastruktur

Pemerataan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu prioritas penting dalam upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hidayat dan Supriyadi (2021) menunjukkan bahwa banyak daerah tertinggal yang masih menghadapi masalah besar terkait sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas yang rusak, kekurangan laboratorium, serta fasilitas pendukung lainnya yang memadai. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di daerah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan dan renovasi sekolah di daerah terpencil menjadi langkah penting untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia.

Program Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, yang diluncurkan oleh pemerintah, bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ini dengan membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah yang membutuhkan. Menurut OECD (2021), infrastruktur yang baik dan merata sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pencapaian standar pendidikan yang tinggi. Pembangunan yang merata tidak hanya terbatas pada gedung sekolah, tetapi juga mencakup fasilitas olahraga, ruang laboratorium, dan aksesibilitas untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Program ini juga perlu disertai dengan pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut digunakan secara optimal.

Lebih lanjut, pemerintah juga harus memastikan pemenuhan sarana teknologi di seluruh Indonesia, terutama di daerah pedesaan. OECD (2021) menekankan bahwa teknologi yang memadai akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan akses yang lebih setara terhadap informasi. Pemerintah perlu mengupayakan penyediaan fasilitas internet dan perangkat teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital. Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan setiap siswa di Indonesia dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, terlepas dari lokasi geografis mereka.

2.4 Digitalisasi Pendidikan

Digitalisasi pendidikan menjadi salah satu strategi penting untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang mendorong pembelajaran jarak jauh. Pemerintah Indonesia, melalui platform seperti Belajar.id, berusaha memperluas akses pembelajaran berbasis teknologi, terutama di daerah terpencil yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan digital. OECD (2021) mencatat bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan tidak hanya

meningkatkan efektivitas pembelajaran tetapi juga memperluas akses ke sumber daya pendidikan yang lebih beragam, yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan abad ke-21.

Menurut Selwyn (2016), penerapan teknologi dalam pendidikan dapat mengatasi kesenjangan pembelajaran yang sering kali muncul karena perbedaan dalam akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan teknologi yang lebih baik, siswa di daerah terpencil dapat mengakses materi pendidikan yang setara dengan siswa di kota besar. Namun, tantangan terbesar dalam digitalisasi pendidikan adalah memastikan bahwa semua siswa dan guru memiliki keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkan teknologi dengan optimal. Oleh karena itu, program pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa harus menjadi bagian integral dari kebijakan ini.

Selain menyediakan platform seperti Belajar.id, pemerintah juga perlu memperhatikan penyediaan akses internet yang merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang belum terjangkau. Selwyn (2016) mengingatkan bahwa pembelajaran digital hanya efektif jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Pemerintah harus berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dan sektor swasta untuk memperluas jaringan internet dan memastikan kualitasnya. Pengembangan infrastruktur digital ini akan menjadi kunci dalam meningkatkan pemerataan pendidikan dan kualitas pengajaran di era digital yang semakin berkembang.

3. Kolaborasi Berkelanjutan antara Pemangku Kepentingan

3.1 Pemerintah dan Sekolah

Pemerintah dan sekolah memainkan peran yang saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan regulasi, menetapkan kebijakan pendidikan, serta menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung infrastruktur pendidikan yang berkualitas. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021) di Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan seperti Program Sekolah Penggerak yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengelola kurikulum dan meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan demikian, peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung sangat krusial untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.

Di sisi lain, sekolah sebagai unit pelaksana kebijakan pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bryson et al. (2015) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada hubungan yang efektif antara pemerintah dan sekolah. Sekolah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut diterjemahkan dengan baik ke dalam praktik di kelas, yang tidak hanya melibatkan pengelolaan kurikulum, tetapi juga peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan profesi guru, serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sekolah menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan.

Penelitian oleh OECD (2021) menunjukkan bahwa negara-negara dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sekolah, seperti Finlandia, berhasil mencapai standar pendidikan yang tinggi dan dapat dijadikan model bagi negara lain. Negara-negara ini

telah terbukti berhasil menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui hubungan yang produktif antara pemerintah dan sekolah. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman negara-negara tersebut, dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan sekolah-sekolah di seluruh tanah air, serta memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan konteks lokal mereka.

3.2 Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pendidikan anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Epstein (2018) dalam teorinya tentang kemitraan sekolah dan keluarga menyatakan bahwa kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan akademis dan sosial anak. Orang tua yang terlibat aktif dalam pendidikan anak mereka cenderung dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa. Partisipasi orang tua dapat bervariasi mulai dari menghadiri pertemuan sekolah hingga berkontribusi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran siswa. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk membangun saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan orang tua untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Bryson et al. (2015) menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dan peran sekolah, tetapi juga pada dukungan yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Komunitas dapat berperan dalam menyediakan fasilitas belajar tambahan, seperti pusat komunitas untuk kegiatan bimbingan belajar atau tempat pembelajaran yang bebas biaya. Hal ini sangat penting terutama di daerah yang kurang memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang memadai. Masyarakat juga dapat mendukung dengan menyediakan sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pembelajaran siswa, seperti pengajaran keterampilan atau berbagi pengetahuan terkait profesi tertentu.

Pentingnya kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan sekolah juga ditegaskan oleh Henderson dan Mapp (2002) yang menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak memiliki efek positif tidak hanya pada prestasi akademik tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, seringkali terbatas oleh faktor ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan orang tua sangat penting untuk memperkuat kolaborasi ini. Program seperti pelatihan orang tua tentang cara mendukung pembelajaran di rumah dan cara berkomunikasi dengan guru dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak.

Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali ada tantangan dalam membangun kemitraan yang efektif antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dempsey dan Sandler (1997) menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya waktu, rendahnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan dapat menjadi hambatan dalam menciptakan kemitraan yang produktif. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan pemerintah untuk menyediakan pelatihan dan dukungan yang cukup untuk orang tua agar mereka merasa lebih terlibat dalam

pendidikan anak-anak mereka. Pembentukan forum-forum komunikasi antara sekolah dan orang tua, serta program-program yang melibatkan masyarakat secara langsung, dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan ini.

Pentingnya kolaborasi ini juga dapat dilihat dari keberhasilan negara-negara yang telah berhasil menciptakan sinergi antara orang tua, masyarakat, dan sekolah. Harris dan Goodall (2008) menekankan bahwa negara-negara dengan sistem pendidikan yang sukses sering kali memiliki kebijakan yang mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. Model-model kemitraan ini, seperti yang diterapkan di negara-negara Skandinavia, menunjukkan bagaimana kolaborasi yang erat dapat menghasilkan peningkatan mutu pendidikan yang signifikan. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari pengalaman-pengalaman ini untuk memperkuat kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

3.3 Swasta dan LSM

Kolaborasi antara sektor swasta, LSM, dan pemerintah dalam pendidikan dapat menciptakan inovasi yang mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Hernandez et al. (2021) menekankan bahwa sinergi antara sektor publik dan swasta dapat menghasilkan berbagai program yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada inovasi dalam pendekatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Perusahaan-perusahaan besar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) telah mendanai berbagai inisiatif pendidikan, seperti pembangunan sekolah, pelatihan guru, serta pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kerja sama semacam ini memberikan kontribusi langsung pada pengurangan kesenjangan pendidikan yang ada, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani.

Selain itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) memainkan peran penting dalam mengimplementasikan program pendidikan yang lebih inklusif dan berfokus pada kelompok-kelompok marginal. UNICEF (2021) mengungkapkan bahwa LSM seringkali dapat menjangkau komunitas yang terpinggirkan, termasuk di daerah-daerah terpencil, dengan mengembangkan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. LSM juga terlibat dalam menyediakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat, pendidikan keaksaraan, serta inisiatif berbasis teknologi yang meningkatkan kemampuan literasi digital di kalangan guru dan siswa. Program-program semacam ini telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan akses pendidikan di berbagai daerah, termasuk di kawasan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal.

Pentingnya kolaborasi ini juga didukung oleh Liu dan Xie (2020) yang menunjukkan bahwa kemitraan antara sektor swasta, LSM, dan pemerintah dapat mempercepat adopsi teknologi dalam pendidikan, yang sangat diperlukan untuk memperluas akses ke pendidikan berkualitas di era digital. Oleh karena itu, memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM dapat menjadi salah satu solusi utama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Kolaborasi yang terstruktur dengan baik juga membantu menciptakan ruang untuk inovasi dan eksperimen dalam pendekatan pendidikan, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

3.4 Kolaborasi Internasional

Kolaborasi internasional dalam pendidikan memberikan peluang besar bagi negara-negara untuk mengadopsi praktik terbaik dan menyesuaikan kebijakan pendidikan mereka sesuai dengan perkembangan global. OECD (2021) menyatakan bahwa negara-negara yang aktif dalam menjalin kerja sama internasional memiliki sistem pendidikan yang lebih adaptif dan mampu menghadapi tantangan global. Misalnya, Finlandia, yang sering menjadi model bagi sistem pendidikan unggul, telah memperoleh manfaat besar dari kolaborasi internasional dalam merancang kurikulum yang relevan, melaksanakan pelatihan guru secara berkelanjutan, dan melakukan evaluasi pendidikan yang sistematis. Kerja sama internasional ini memungkinkan negara-negara untuk belajar dari pengalaman sukses negara lain, sekaligus memperkenalkan solusi inovatif yang bisa diterapkan dalam konteks lokal.

Menurut UNESCO (2021), organisasi internasional memainkan peran penting dalam memberikan panduan, dukungan teknis, dan kerangka kebijakan untuk membantu negara-negara merancang sistem pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya kemitraan internasional, negara-negara dapat mengakses sumber daya dan penelitian global, yang berguna untuk mengembangkan kebijakan yang berbasis bukti. UNESCO, melalui program-programnya, berfokus pada meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung inklusi pendidikan untuk semua, serta mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan kesenjangan pendidikan yang dihadapi oleh negara berkembang.

Kolaborasi ini juga memungkinkan berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang mengutamakan teknologi dan literasi digital. Selwyn (2016) berpendapat bahwa kolaborasi internasional dapat mempercepat adopsi teknologi dalam pendidikan, yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi mendatang untuk memasuki pasar tenaga kerja yang semakin digital. Negara-negara yang bekerja sama dengan organisasi internasional seperti OECD dan UNESCO sering kali lebih maju dalam hal integrasi teknologi pendidikan, serta menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih terbuka dan terjangkau bagi semua pihak.

Indonesia, dengan menjalin kemitraan lebih erat dengan organisasi internasional, dapat mempercepat reformasi pendidikan domestiknya. Melalui dialog dengan negara-negara seperti Finlandia dan Korea Selatan, Indonesia bisa mendapatkan wawasan baru terkait implementasi kebijakan yang berhasil, baik dalam hal kurikulum, evaluasi, maupun pengembangan profesional guru. Bryson et al. (2015) menyatakan bahwa kolaborasi internasional memungkinkan negara berkembang untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan standar global, sehingga kualitas pendidikan dapat terus meningkat seiring dengan dinamika dunia.

KESIMPULAN

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta. Disparitas akses pendidikan, kualitas tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta tantangan dalam pemanfaatan teknologi merupakan masalah utama yang harus diatasi untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan merata. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan seperti program Sertifikasi Guru, Kurikulum Merdeka, serta pemerataan infrastruktur pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Namun, upaya ini membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara semua pemangku kepentingan untuk

mewujudkan hasil yang optimal.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta kerjasama internasional dengan organisasi seperti UNESCO dan OECD, memainkan peran penting dalam inovasi pendidikan dan pertukaran praktik terbaik. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan keterlibatan LSM dalam pendidikan telah membuahkan hasil positif, terutama di daerah terpencil dan marginal. Dengan adanya kebijakan yang terintegrasi, peningkatan kompetensi guru, reformasi kurikulum yang relevan, serta pemanfaatan teknologi pendidikan yang merata, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat mencapai kualitas yang lebih tinggi, serta siap menghadapi tantangan global di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, D., Santosa, H. B., & Sulastri, A. (2022). *Kurikulum berbasis kompetensi dan dampaknya terhadap keterampilan abad ke-21 di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan*, 45(1), 123-138.
- Anggraini, D., Widyastuti, S., & Adi, T. (2022). *Kurikulum Merdeka: Implikasi terhadap pengembangan keterampilan abad ke-21 dalam pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 15(2), 112-124.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2015). *Public administration and public policy: Public-private partnerships for public services*. Routledge.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2015). *Public sector leadership: A theory-based approach to implementation and impact*. SAGE Publications.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2015). *Public sector leadership: Case studies and reflections*. *Journal of Public Administration*, 42(3), 225-248. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1011047>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). *Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging*. *Public Administration Review*.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Pearson Education.
- Epstein, J. L. (2018). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools*. Westview Press.
- Gertler, P. J., Walque, D. D., & Rawlings, L. B. (2018). *The impact of education on poverty reduction: Evidence from Latin America and the Caribbean*. World Bank Group.
- Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2019). *Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence*. *Educational Leadership*, 77(1), 20-27.
- Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2019). *The distribution of teacher quality and implications for policy*. *Annual Review of Economics*, 11, 197–225.
- Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2019). *The economics of school quality*. National Bureau of Economic Research.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). *Education and Economic Growth*. International Encyclopedia of Education.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT Press.
- Harris, A., & Goodall, J. (2008). *Do parents know they matter? Engaging all parents in learning*. *Educational Research*, 50(3), 277-289. <https://doi.org/10.1080/00131880802309424>
- Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). *A new wave of evidence: The impact of school, family,*

- and community connections on student achievement.* Southwest Educational Development Laboratory.
- Hernandez, D., Lee, J., & Rodriguez, E. (2021). *Public-private partnerships in education: Innovations and outcomes.* Journal of Education and Policy, 45(2), 123-139. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.04.002>
- Hernandez, F., Bhat, A., & Anderson, M. (2021). *The role of public-private partnerships in education: Building sustainable models.* Journal of Education Policy, 35(2), 214-231.
- Hidayat, M., & Supriyadi, D. (2021). *Sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan sarana pendidikan di daerah terpencil.* Jurnal Pendidikan Indonesia, 15(3), 45-59.
- Hidayat, R., & Supriyadi, S. (2021). *Analisis persebaran sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia.* Jurnal Pendidikan Indonesia, 10(3), 101-115.
- Hoover-Dempsey, K. V., & Sandler, H. M. (1997). *Why do parents become involved in their children's education? Review of Educational Research,* 67(1), 3-42. <https://doi.org/10.3102/00346543067001003>
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (5th ed.). Oxford University Press.
- Ingersoll, R. M. (2018). *The teacher shortage: Why it matters and what we can do about it.* Educational Leadership, 76(3), 24-30.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Guru Penggerak: Membangun kepemimpinan pedagogis di sekolah.* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kirkwood, A., & Price, L. (2014). *Technology and learning: A framework for transformation.* Routledge.
- Kurniawati, N., Pratiwi, A. P., & Jatmiko, W. (2022). *Analisis disparitas akses pendidikan di daerah terpencil: Studi kasus Indonesia.* Jurnal Kebijakan Publik, 12(1), 45-58.
- Kurniawati, N., Pratiwi, A. P., & Jatmiko, W. (2022). *The challenges of access to quality education in remote areas: Evidence from Indonesia.* Jurnal Pendidikan Indonesia, 15(1), 65-78.
- Liu, Y., & Xie, S. (2020). *The role of private sector and NGOs in education: A global perspective.* Education and Development, 36(1), 87-105. <https://doi.org/10.1007/s10612-020-00475-0>
- Makarim, N. (2020). *Peluncuran kurikulum merdeka untuk pendidikan Indonesia.* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Makarim, N. (2020). *Peluncuran Kurikulum Merdeka.* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- OECD. (2020). *Education at a glance 2020: OECD indicators.* OECD Publishing.
- OECD. (2021). *The impact of international collaboration in education: The case of Finland and Korea.* OECD Education Working Papers, No. 233. <https://doi.org/10.1787/5jrs2b0j2m0>
- Puslitjakkidbud. (2020). *Laporan hasil penelitian kompetensi pedagogik guru di Indonesia.* Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Selwyn, N. (2016). *Education and technology: Key issues and debates.* Bloomsbury Publishing.
- Selwyn, N. (2016). *Is technology good for education?* Polity Press.
- Sykes, G., Bird, T., & Kennedy, M. M. (2017). *Teacher education and the challenge of contemporary educational reform.* Educational Researcher, 46(7), 375-384.
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report: Inclusion and education.* UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2021). *Transforming education: The role of international partnerships.* UNESCO.

<https://www.unesco.org/en/articles/transforming-education-role-international-partnerships>

UNICEF. (2021). *Annual report: Education for all*. UNICEF.

Vaughan, M., Davies, M., & Hughes, P. (2018). *The role of school infrastructure in improving education outcomes*. *International Journal of Educational Development*, 61, 64-73.

World Bank. (2021). *Improving access to education in rural areas*. World Bank Group.

World Bank. (2021). *World development report 2021: Data, digitalization, and education*. World Bank.

Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations*. 8th Edition. Pearson Education.

Zhao, Y., Li, H., & Li, Y. (2021). *Challenges of digital literacy in rural education: A study of teachers' digital competence in rural China*. *Computers & Education*, 160, 1-13.

Zhao, Y., Zhang, G., & Liu, X. (2021). *Bridging the digital divide: Education in rural areas during the pandemic*. *Educational Researcher*, 50(6), 403–416.

Zhou, M., & Lee, Y. (2021). *Bridging the education gap: The role of infrastructure and technology in rural education*. *Journal of Rural Education*, 36(2), 78-91.